



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5686-5697

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Arkeologi Ruang: Pola Pemukiman Pemerintahan Kerajaan Marusu

Muhammad Akil Ridho^{1✉}, Hamka Naping², Yahya³

Antropologi, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: Akilridho.ar@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kerajaan Marusu terletak serta mencakup beberapa wilayah dalam Kabupaten Maros dan Kota Makassar. Kerajaan Marusu merupakan salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan yang masih mempertahankan sebagian kebudayaan masa lalunya. Penelitian ini memusatkan perhatian pada kajian arkeologi keruangan dengan menggunakan satuan ruang skala makro. Skala makro yaitu mempelajari hubungan antar situs yang meliputi distribusi, jarak serta hubungan. Adapun pendekatan teoritik yang digunakan adalah pendekatan ekologi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah apa saja situs yang terdapat pada wilayah Kerajaan Marusu dan bagaimana bentuk persebarannya. Selain tujuan tersebut, penelitian ini juga berusaha melihat bagaimana kondisi lingkungan di situs-situs Kerajaan Marusu. Akhir dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 36 situs peninggalan Kerajaan Marusu yaitu 11 Balla Lompoa/Saoraja, 19 Kompleks Makam dan 6 Masjid. Berdasarkan kepadatan sebaran situs, 11 Kecamatan di kabupaten Maros memiliki situs dan 21 Desa/Kelurahan yang memiliki situs atau 21,63% dari seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Maros. Berdasarkan derajat persebarannya, keseluruhan terdapat pada Kabupaten Maros menghasilkan Nearest Neighbor Ratio/Derajat penyebaran 0.402447, hal tersebut memperlihatkan bentuk persebaran situs berkelompok (Clustered). Selain itu, diketahui bahwa keletakan situs-situs Kerajaan Marusu cukup besar dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya seperti ketinggian, kelerengan, sumber air, jenis tanah dan batuan.

Keyword: *Kerajaan Marusu, Sebaran Pemukiman Pemerintahan, Arkeologi Ruang*

Abstract

The Marusu Kingdom is located and includes several areas within the Maros Regency dan Makassar City. The Marusu Kingdom is one of the Kingdoms in South Sulawesi, which still preserves some of its past cultures. The research focuses on the study of spatial archeology with using macro-scale units of space. Macro-scale is studying relationship between sites which includes distribution, distance and relationship. As for the approach the theoretical used is an ecological approach. The objectives to be achieved in the research are what sites are on the territory of the Marusu Kingdom and how it spreads. Other than the goal this research also looks at how the environmental conditions are Marusu Kingdom. The end of the study shows that there are 36 sites of royal heritage Marusu including 11 Balla Lompoa/Saoraja, 19 tomb complex and 6 old Mosque. Based on the density of site distribution, 11 Districts in the Maros Regency contains sites and 21 sub-districts that have sites or 21,63% from all sub-districts in Maros Regency. Based on degrees distribution, all sites found in Maros Regency produces Nearest Neighbor Ratio deployment degree 0.402447, that is shows the distribution form of clustered sites. Besides it is known that the location of the Marusu royal sites was significantly affected by the surrounding environmental conditions such as altitude, slope, water sources, type of soil and rocks.

Kata Kunci : *Debit banjir, angkutan sedimen, agradasi, degradasi*

PENDAHULUAN

Kerajaan Marusu merupakan salah satu wilayah yang memiliki catatan sejarah besar. Banyak peradaban manusia yang lahir di wilayah tersebut dan dikenal di dunia luar. Peradaban itu dibentuk dalam tatanan kerajaan. Keberadaan kerajaan tersebut dapat diketahui melalui naskah-naskah kuno, catatan misionaris, dan tinggalan budaya material. Salah satu sumber informasi yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui asal usul Kerajaan Marusu adalah *Lontara Patturioloang Marusu* yang menerangkan tentang latar belakang lahirnya Kerajaan Marusu pada pertengahan abad XV.

Dalam studi arkeologi, naskah termasuk salah satu sumber informasi yang dapat digunakan dalam penelitian. Nilai sejarah budaya dan keterangan-keterangan yang terkandung di dalam naskah *lontara Patturioloang Marusu*, memungkinkan arkeologi memandangnya sebagai sumber yang bisa digunakan membangun interpretasi masa lalu. Adapaun nilai sejarah yang dimaksud, berupa aspek sosial, keagamaan, kelompok masyarakat, lingkungan alam, teknologi, interaksi sosial, dan macam-macam institusi. Oleh karena itu, agar memungkinkan arkeologi memandangnya sebagai sumber yang bisa digunakan dalam menarik kesimpulan, nilai-nilai sejarah budaya tersebut relevan dengan keberadaan budaya material yang terjelaskan dalam *lontara*. Salah satu situs yang menarik untuk dikaji melalui pendekatan ini adalah Kerajaan Marusu di Kabupaten Maros. Indikasi

tentang adanya sebuah wilayah Kerajaan Marusu, dapat dilihat dari temuan-temuan arkeologis berupa bangunan tempat tinggal dan suci, toponimi-toponimi, adanya makam dan acara pemakaman, monumen, tempat upacara ritual dan acara-acara seremonial, alat transportasi serta jaringan-jaringan jalan. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dijadikan sebagai keterangan awal dari *lontara* terkait pemukiman Kerajaan Marusu.

Sejarah keberadaan Kerajaan Marusu saat ini dapat kita telusuri melalui tradisi tutur/cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi, serta dari jejak-jejak budaya materi yang masih dapat kita temukan. Jejak-jejak tentang adanya aktivitas masa lalu pada daerah ini dapat kita lihat dari kehadiran tinggalan bangunan tempat tinggal dan suci, toponimi-toponimi, adanya makam dan acara pemakaman, monumen, tempat upacara ritual dan acara-acara seremonial yang tersebar pada titik-titik tertentu di wilayah Kerajaan Marusu. Diajukan beberapa pertanyaan untuk memudahkan dalam membangun gambaran terkait pemukiman pemerintahan Kerajaan Marusu pada masa lalu, yaitu situs - situs apa saja yang terdapat pada wilayah pemerintahan Kerajaan Marusu, Bagaimana sebaran situs – situs yang terdapat pada wilayah pemerintahan Kerajaan Marusu serta faktor lingkungan yang mempengaruhi tata ruang kota pemerintahan Kerajaan Marusu.

Penelitian ini bertujuan mengetahui situs – situs apa saja yang terdapat pada wilayah pemerintahan Kerajaan Marusu dan menginterpretasikan bentuk-bentuk persebarannya. Dalam kaitannya dengan tiga tujuan arkeologi yang dikemukakan oleh Binford (1972) yaitu rekonstruksi sejarah budaya, rekonstruksi cara-cara hidup dan penggambaran proses budaya (Binford, 1972), maka penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi cara-cara hidup masa lampau. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah studi arkeologi, khususnya penelitian yang menggarap Kerajaan Marusu, dalam tema arkeologi keruangan secara umum. Demikian selanjutnya, penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai sarana perekam data arkeologi masa kini. Oleh karena itu, rekaman ini sewaktu waktu di masa yang akan datang dapat dipergunakan kembali untuk menyusun sejarah budaya.

METODE PENELITIAN

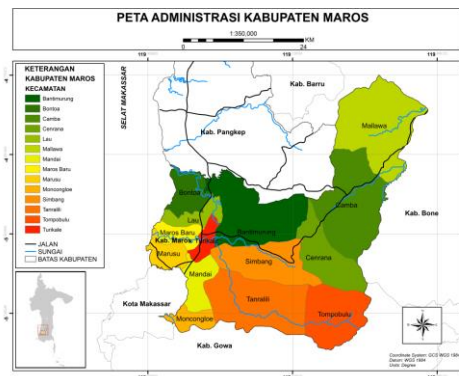
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode arkeologi yang menitikberatkan kegiatannya pada, pengumpulan data, pengolahan data dan penafsiran data. Semua tahap tersebut ditempuh sebagai usaha dalam melakukan penarikan kesimpulan terhadap peninggalan masa lalu. (Deetz, 1968: 8). Pengumpulan data, pada tingkat ini terdapat tiga teknik pengumpulan data secara umum yang akan digunakan yaitu metode pustaka, survei dan wawancara. Untuk pencapaian tujuan penelitian tersebut, maka ketiga metode tersebut harus digunakan. Tahap pengolahan data meliputi klasifikasi, analisis

keletakan, analisis kontekstual, dan analisis keruangan. Tahap penafsiran data merupakan rangkaian terakhir dalam metode penelitian. Pada tahap ini, penafsiran data dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu hubungan serta sebaran tinggalan dari wilayah Kerajaan Marusu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Maros merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, terletak antara 5° 00' 08" LS dan 119° 34' 32" BT. Luas wilayah Kabupaten Maros ±1.619,12 km², terletak ± 30 KM arah utara dari Kota Makassar. Secara administrasi pemerintahan terdiri atas 14 wilayah kecamatan dan 103 desa/kelurahan. Kedudukan secara administratif berbatasan, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.



Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Maros
(Sistem Informasi Geografis, ArcGis)

Sulawesi Selatan seperti halnya dengan wilayah Indonesia lainnya dicirikan oleh iklim tropika basah, dua musim mempengaruhi iklim tersebut yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan berlangsung pada bulan Oktober–Maret dan musim kemarau berlangsung pada bulan April–September, curah hujan tahunan berkisar 2000–3000 mm dengan nilai curah hujan bulanan rata-rata sekitar 98 mm dan 430 mm, kedua musim dipengaruhi oleh arah bertiupnya angin yang konstan yaitu angin barat di musim hujan dan angin timur di musim kemarau, di selat Makassar angin bertiup ke arah selatan pada musim hujan dan ke arah utara pada musim kemarau, arah bertiupnya angin tersebut disertai dengan mengalirnya arus laut pada arah yang sama pada setiap perubahan musim, arus laut ke utara relatif lebih panjang selang waktunya sehingga sedimentasi cenderung berkembang ke arah utara.

Sejarah Kerajaan Marusu

Maros juga mengawali sejarahnya dengan mitos *Tomanurung* sebagai pembuktian sosial kultur masyarakat tertinggi. *Karaeng LoE Ri Pakere'* dipercaya sebagai *Tomanurung* yang mendasari sejarah Maros. Dalam periode Lontara, *Karaeng LoE Ri Pakere'* adalah sosok yang pertama kali membentuk sistem kemasyarakatan dan mengakhiri periode kegelapan (Harun, 1990). *Karaeng LoE ri Pakere'* tampil sebagai pemimpin yang memperkenalkan otoritas dan eksistensi negerinya kepada kerajaan-kerajaan tetangga ketika menjalin persekutuan dengan Raja Gowa IX, *Daeng Matanre Tumapa'risi' Kallongna*, Raja Bone VI, *La Uliyo Bote'e Matinroe ri Itterung* dan Raja *Polongbangkeng, Karaeng LoE ri Bajeng*. Ada beberapa sejarawan yang berpendapat bahwa *Karang LoE ri Pakere'* yang sejaman dengan Raja Gowa IX dan Raja Bone VI ini sudah tidak berstatus "*Tomanurung*". *Lontara Patturioloanga ri Gowa*, tercatat adanya sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Marusu. Kerajaan ini cukup berpengaruh karena terletak di antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone, selain itu Kerajaan Marusu tidak memiliki ambisi dalam melebarkan sayap kekuasaan karena dipengaruhi prinsip dalam menjalankan tata politik pemerintahannya. Hal ini karena, ia memiliki keadaan hidup yang sederhana yang bersumber dari kerja keras para rakyatnya. Kapan berdirinya kerajaan ini tidak diketahui pasti, raja pertamanya disebutkan *Karaeng LoE Ri Pakere*, pada masa yang bersamaan dengan kekuasaan *Karaeng Tumapa' risi' Kallonna*, Raja Gowa IX atau sekitar 1463.

Setelah Belanda menguasai kerajaan di Sulawesi Selatan termasuk Marusu, maka bentuk pemerintahannya pun diubah menjadi sebuah kerajaan kecil yang berbentuk adat dengan kepala pemerintahan bergelar *Karaeng* yang merupakan raja tak bermahkota, setelah itu Marusu pun terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang kemudian hanya menyisahkan 36 kampung, ada pun kerajaannya yaitu: Kerajaan Simbang, Kerajaan Bontoa, Kerajaan Tanralili, Kerajaan Raya, Kerajaan Lau, dan Kerajaan Turikale, kemudian Karaeng dari Kerajaan Marusu besar, La Mamma Daeng Marewa, mengadakan pertemuan untuk menyatukan kembali Kerajaan Marusu yang di kenal dengan nama *Toddo Limayya ri Marusu* (Aspar, 2011). Rusdy (2011) menjelaskan bahwa Marusu pada pasca perjanjian bungayya juga dikategorikan berada langsung dalam kekuasaan Belanda. Dampak selanjutnya adalah "migrasi" pangeran-pangeran dari Kerajaan Gowa, Bone dan Luwu ke negeri lain di luar kerajaannya sebagai sikap ketidakpuasan dengan perjanjian bungayya dengan mendirikan kerajaan serta kesultanan baru di wilayah sekitar Marusu. Kerajaan dan kesultanan tersebut antara lain Turikale, Simbang, Tanralli, Bontoa, Tangkuru, Raya, Lau', Timboro', dan Kabba (wara), serta beberapa Kerajaan di wilayah pegunungan Lebbo' Tengae. Pada Tahun 1859, daerah-daerah tersebut dimodifikasi lagi oleh Belanda dengan membentuk

Regentschappen Kepala Pemerintahan pada masing-masing *Regentschappen* tersebut di atas bergelar *Karaeng* yang dipilih dari bangsawan setempat yang memenuhi syarat oleh masing-masing kepala kampung dengan persetujuan pemerintahan Belanda di Makassar.

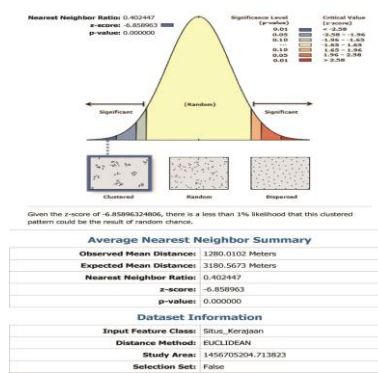
Sebaran Situs-Situs Kerajaan Marusu

Hasil dari penelitian baik dari tinjauan pustaka maupun survey pada daerah penelitian secara administratif meliputi Kabupaten Maros dan sedikit dari wilayah Kota Makassar terkhusus Kecamatan Biringkanaya Sudiang, memperlihatkan secara keseluruhan berjumlah 35 situs, diantaranya 11 *Balla Lompoa/Saoraja*, 18 Kompleks Makam dan 6 Mesjid. Kabupaten Maros yang memiliki luas $\pm 1.619,12 \text{ km}^2$, ditemukan 33 situs diantaranya 10 *Balla Lompoa/Saoraja*, 17 Kompleks Makam dan 6 Mesjid. Sedangkan untuk Kecamatan Biringkanaya, Sudiang yang luasnya $13,49 \text{ km}^2$ ditemukan 2 situs diantaranya 1 *Balla Lompoa* dan 1 Kompleks Makam.

Diantara 14 wilayah kecamatan Kabupaten Maros, terdapat 3 kecamatan yang tidak mengandung situs, meliputi Tompobulu, Tanralili dan Cenrana. Kecamatan yang mengandung situs arkeologi terbanyak adalah Kecamatan Camba dengan jumlah 7 situs, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Lau dan Moncongloe dengan jumlah 1 situs. Kecamatan lain seperti Turikale dan Marusu masing-masing berjumlah 5 situs, Maros baru dan Mallawa berjumlah 3 situs, serta Simbang, Mandai, Bontoa dan Bantimurung masing masing berjumlah 2 situs.

Diantara 103 Desa/Kelurahan di Kabupaten Maros, terdapat 21 Desa/Kelurahan yang memiliki situs atau 21,63 % diketahui memiliki situs. 13 Desa/Kelurahan hanya memiliki 1 situs diantaranya Bentenge, Boto Marannu, Bonto Tallasa, Bontoa, Jenetaesa, Moncingloe Lappara, Nisombalia, Panjjallingan, Pattontongan, Sawaru, Tellumpanuae, Tupabbiring dan Wanuwawaru. Terdapat 5 Desa/Kelurahan yang memiliki 2 situs diantaranya Abulosibattang, Bonto Matene, Cempaniga, Kalabirang dan Pattuadae. Desa lain seperti Baju Bodoa dan Turikale masing masing memiliki 3 situs dan Desa/Kelurahan terbanyak memiliki situs adalah Cenrana dengan jumlah 4 situs. Pada wilayah Kota Makassar khususnya Kecamatan Biringkanaya, Sudiang, berjumlah 2 situs.

Dengan menggunakan metode analisis tetangga terdekat, dengan *software arcmap* 10.8, maka diperoleh hasil pola persebaran keseluruhan situs, seperti pada gambar berikut;



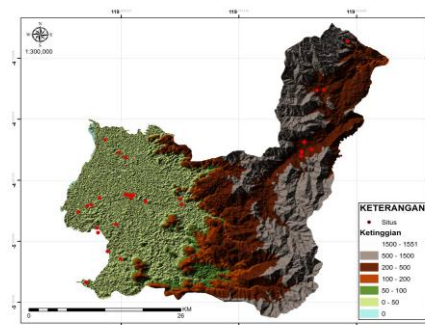
Gambar 2 Hasil Statistik Analisis Tetangga Terdekat Situs

Sumber: Sistem Informasi Geografis, Arcgis 10.8 *average nearest neighbor*

Berdasarkan hasil analisis tetangga terdekat diatas (gambar 4.44), menggunakan Arcgis10.3, pola persebaran keseluruhan situs di Kabupaten Maros menghasilkan *Nearest Neighbor Ratio*/Derajat penyebaran 0.402447 dengan *expected means* (rata rata jarak yang di harapkan) 3180.5673, *observed means* (rata-rata jarak yang diteliti) 1280.0102, z-score - 6.858963 dan p-value 0.000000. Hal ini menunjukkan derajat persebaran situs di Kabupaten Maros adalah berkelompok (*Clustered*).

Persebaran Situs Berdasarkan Kondisi Lingkungan Ketinggian

Pada lokasi penelitian, keletakan situs berdasarkan ketinggian bervariasi yaitu mulai dari titik 4 mdpl sampai pada ketinggian 680 mdpl. Berdasarkan rentang jarak ketinggian tersebut, situs yang berada pada ketinggian terendah adalah Kompleks Makam Jera Lompoa Pandang Pandang di Kecamatan Bontoa, Tupabiring sedangkan yang tertinggi Saoraja Wanuwawaru di Kecamatan Mallawa, Wanuwawaru.



Gambar 3 Keletakan Situs Berdasarkan Ketinggian

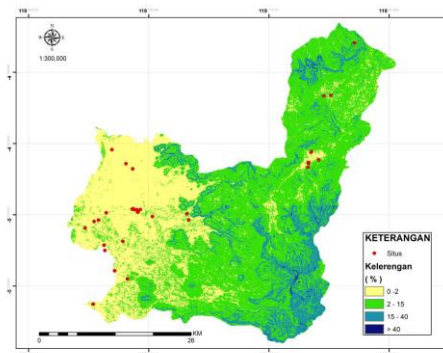
Sumber: Sistem informasi Geografis (SIG)

Dengan menggunakan patokan ketinggian dari Van Zuidam R.A, dimana keletakan ketinggian situs situs dikelompokkan menjadi 5 unsur morfologi yaitu daratan rendah (<50 mdpl), daratan rendah pedalaman (50-100 mdpl), perbukitan rendah (100-200 mdpl),

perbukitan (200-500 mdpl) dan perbukitan tinggi (500-1500 mdpl). Tergambarkan bahwa sebagian besar situs di Kabupaten Maros terletak pada darah daratan rendah (<50 mdpl) dengan jumlah 25 situs atau sekitar 72,23 % dari jumlah keseluruhan. Sedangkan untuk situs yang berada pada ketinggian 200–500 mdpl atau perbukitan memperlihatkan jumlah yang lebih kecil yaitu 9 situs atau sekitar 25% dari seluruh situs. Sedangkan untuk situs yang berada pada ketinggian 500–1500 atau perbukitan tinggi hanya terdapat 1 situs sekitar 2,77 % dari keseluruhan situs. dijelaskan bahwa semakin tinggi daratan maka semakin minim populasi persebaran situs di Kabupaten Maros dan sebaliknya semakin rendah suatu daratan maka akan semakin banyak populasi sebaran situs di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manusia masa lampau memiliki kecenderungan dalam memilih wilayah aktivitasnya pada daerah daratan rendah.

Kelerengan

Berdasarkan klasifikasi kelerengan menurut Direktorat Jenderal Agraria, persebaran situs di Kabupaten Maros terbagi dalam beberapa golongan. Sebagian besar keletakan situs berdasarkan kelerengan mendominasi golongan D atau berkisar 0–2%. Situs yang termasuk dalam golongan kelerengan tersebut berjumlah 29 situs. Sedangkan untuk golongan C yang kelerengannya berkisar 2–15% terdapat 6 situs.



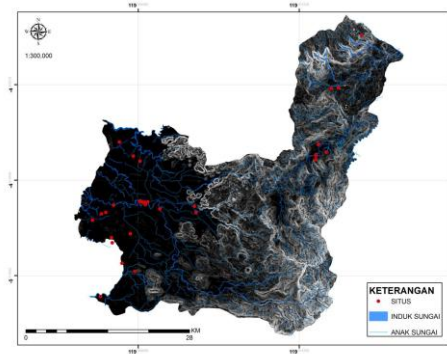
Gambar 4 Keletakan Situs Berdasarkan Kelerengan

Sumber: Sistem informasi Geografis (SIG)

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat situs yang memiliki kemiringan lereng 15 - > 40%, selain itu persebaran dengan populasi situs terbanyak terdapat pada persentase kemiringan lereng 0–2% atau golongan kelerengan D sebesar 83,33 % dan sebaran situs 2–15% sebesar 16,67 %. Oleh karena itu, berdasarkan data yang diuraikan di atas dapat dijelaskan bahwa daerah-daerah yang memiliki tingkat kelerengan datar atau landai merupakan tempat tempat yang paling banyak dimanfaatkan orang pada masa lampau dalam menjalankan aktivitas hidupnya disbanding dengan daerah yang memiliki tingkat kelerengan yang miring atau curam.

Jarak Sungai

Dalam upaya mengetahui persebaran situs berdasarkan keletakan sumber air permukaan atau sungai maka dilakukan perhitungan dengan menghitung jarak keletakan situs ke sungai sumber air terdekat. Untuk mempermudah dalam pengelompokan maka jarak akan di kategorikan menjadi 3 bentuk diantaranya kelompok 1 berjarak kurang dari (<) 500 m, kelompok 2 berjarak 500–1000 m dan kelompok 3 berjarak lebih dari (>) 1000 m.



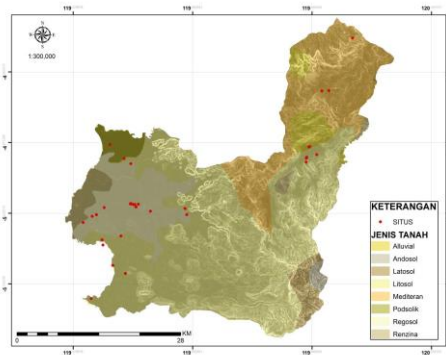
Gambar 5 Keleakan Situs Berdasarkan Jarak Sungai

Sumber: Sistem Informasi Geografis (SIG)

Berdasarkan kategori tersebut, situs yang persebarannya berdasarkan keletakan sungai <500 m atau kelompok 1 berjumlah 23. Persebaran situs berdasarkan keletakan sungai 500–1000 m atau kelompok 2 berjumlah 8 situs Sedangkan untuk persebaran situs berdasarkan keletakan sungai berjarak lebih dari 1000 m atau kelompok 3 berjumlah 4 situs. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa semakin jauh jarak situs dari keletakan sungai maka semakin minim populasi persebaran situs di Kabupaten Maros dan sebaliknya semakin dekat persebaran situs terhadap jarak dari keletakan sungai maka akan semakin banyak populasi sebaran situs di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manusia masa lampau memiliki kecenderungan dalam memilih wilayah aktivitasnya pada daerah yang dengan dengan sumber air permukaan (sungai).

Jenis Tanah

Informasi terkait jenis tanah pada wilayah penelitian diperoleh dari beberapa sumber yakni Kementerian pertanian, Pemerintah Kabupaten Maros serta Lembaga akademik yang kemudian diperoleh persebaran jenis tanah pada wilayah penelitian. Kabupaten Maros tersusun berdasarkan 8 jenis tanah, diantaranya Alluvial, Latosol, Andosol, Litosol, Podsolik, Mediteran, Regosol dan Renzina.



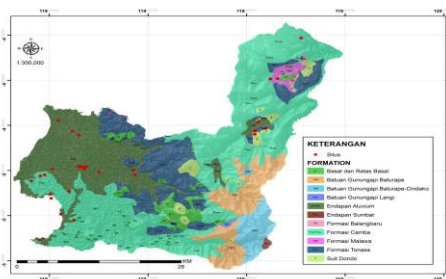
Gambar 6 Keletakan Situs Berdasarkan Jenis Tanah

Sumber: Sistem Informasi Geografis (SIG)

Terlihat bahwa dari seluruh jumlah jenis tanah regosol merupakan jenis tanah yang memiliki persebaran situs terbanyak dengan jumlah 15 situs, jenis tanah litosol dengan jumlah 13 situs, jenis tanah mediteran dengan jumlah 3 situs dan Jenis tanah alluvial dan podsolik masing-masing terdiri atas 2 situs. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa populasi persebaran situs terbanyak terdapat pada jenis tanah litosol dan regosol. Mesti diakui bahwa kedua jenis tanah tersebut merupakan tanah yang memiliki kandungan unsur hara yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Jenis tanah alluvial merupakan jenis tanah yang juga memiliki tingkat kesuburan yang tinggi namun jumlah populasi situs yang tersebar hanya berjumlah 2 situs, hal tersebut menjelaskan sebab jenis tanah alluvial Kabupaten Maros terdapat pada daerah daratan rendah hingga perbukitan rendah sehingga lahan seringkali terkena banjir.

Batuan

Berdasarkan peta tematik geologi oleh Rab Sukamto dan Ram Supriatna (1982) lembar Pangkajene dan Ujungpandang serta pengamatan lapangan, diketahui bahwa terdapat 11 bentuk formasi geologi yang terkandung pada wilayah penelitian, diantaranya 1) Basal dan retas basal 2) Batuan gunung api baturape 3) Batuan gunung api cindako 4) Batuan gunung api langi 5) Endapan Aluvium 6) Endapan sumbat atau pusat erupsi 7) Formasi balangbaru 8) Formasi camba 9) Formasi tonasa 10) Formasi mallawa 11) Suit dondo atau Detroit.



Gambar 7 Keletakan Situs Berdasarkan Formasi Geologi

Sumber: Sitem Informasi Geografis (SIG)

Data yang diperlihatkan menunjukkan bahwa formasi geologi yang mengandung situs arkeologi terbanyak adalah endapan alluvium (Qal/Qac) sebanyak 21 situs atau berjumlah 58,33 % dari keseluruhan situs pada wilayah penelitian, sedangkan untuk situs-situs yang persebarannya pada formasi camba (Tmc) berjumlah 9 situs atau 25 % dari keseluruhan situs pada wilayah penelitian, pada formasi tonasa terdapat 4 sebaran situs serta Formasi Mallawa dan Diorite masing-masing mengandung 1 situs. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa populasi sebaran situs terbanyak terdapat pada formasi alluvium dan formasi camba. Kedua formasi tersebut mengandung batuan yang bertekstur kasar dan berukuran besar sehingga memungkinkan tersedia air tanah dalam jumlah besar.

SIMPULAN

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui situs-situs yang terdapat pada wilayah Kerajaan Marusu serta melihat bentuk persebarannya. Diketahui terdapat 35 situs peninggalan Kerajaan Marusu yang diantaranya 11 *Balla Lompoa/Saoraja*, 18 Kompleks Makam dan 6 Mesjid. Berdasarkan kepadatan persebaran situs, 11 Kecamatan di kabupaten Maros mengandung situs peninggalan kerajaan dan 21 Desa/Kelurahan yang memiliki situs atau 21,63% dari seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Maros. Berdasarkan derajat sebarannya, keseluruhan situs yang terdapat pada Kabupaten Maros menghasilkan *Nearest Neighbor Ratio*/Derajat penyebaran 0.402447, hal tersebut memperlihatkan bentuk persebaran situs berkelompok (*Clustered*).

Selain itu digunakan pula pendekatan ekologi untuk mengetahui persebaran situs berdasarkan keletakan situs dan bentuk lingkungannya. Berdasarkan ketinggian dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi daratan maka semakin minim populasi persebaran situs di Kabupaten Maros dan sebaliknya semakin rendah suatu daratan maka akan semakin banyak populasi sebaran situs di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manusia masa lampau memiliki kecenderungan dalam memilih wilayah aktivitasnya pada daerah daratan rendah. Berdasarkan kelerengan dapat dijelaskan bahwa daerah daerah yang memiliki tingkat kelerengan datar atau landai merupakan tempat tempat yang paling banyak dimanfaatkan orang pada masa lampau dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Berdasarkan jarak air permukaan dapat dijelaskan bahwa semakin jauh jarak situs dari keletakan sungai maka semakin minim populasi persebaran situs di Kabupaten Maros dan sebaliknya semakin dekat persebaran situs terhadap jarak dari keletakan sungai maka akan semakin banyak populasi sebaran situs di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manusia masa lampau memiliki kecenderungan dalam memilih wilayah aktivitasnya pada daerah yang relatif dengan sumber air permukaan (sungai). Berdasarkan jenis tanah dapat dijelaskan

bahwa populasi persebaran situs terbanyak terdapat pada jenis tanah litosol dan regosol sebab kedua jenis tanah tersebut merupakan tanah yang memiliki kandungan unsur hara yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Berdasarkan jenis batuan dapat dijelaskan bahwa populasi sebaran situs terbanyak terdapat pada formasi alluvium dan formasi camba. Kedua formasi tersebut mengandung batuan yang bertekstur kasar dan berukuran besar sehingga memungkinkan tersedia air tanah dalam jumlah besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspar, M. 2011. *Sejarah Kekaraengan Bontoa di Maros*. Makassar: Pustaka refleksi.
- Binford, Lewis R. 1992. *Teori Dan Metode Arkeologi*. Jakarta: Jurnal Arkeologi Indonesia. Issn.
- Fadillah, M. A. 2004. *Penelitian Arkeologi Islam di Sulawesi Selatan dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Kebudayaan Nasional*. Makassar: Inninawa.
- Fagan, Brian. M. 1985. *In The Beginning: An Intuduction to Archaeology. Metode Arkeologi I, II. III. Terjemahan Iwan Sumantri. 2001. (Seri Bahan Perkuliahan)*. Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra. Universitas Hasanuddin. Makassar. Ttb.
- Goede, D. d. 1984. *Urbanisasi dan Urbanisme, Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang berkembang*. Jakarta: PT.Gramedia
- Harun, A. F. 1990. *Kerajaan-kerajaan di Maros dalam lintas sejarah*. Maros: Dekdikbud.
- J Anthony Whitten, M. M. 1987. *Ekologi Sulawesi*. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Martin, J. (2005). *Ecological Arrchaeologi dalam Colin Renfrew and Paul Bahn*. London and New York. Routledge: Archaeology: The Key concepts.
- Mundardjito. 2002. *Pertimbangan Ekologis Penempatan Situs Hindu-Budha di Yogyakarta*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra Ecole Francaise D'Extreme Orien.
- Nasruddin. 1998. *Kajian Naskah Patturioloang*. Jakarta: Kalpataru.
- Nasruddin, T. 2006. *Awal Hunian (Permukiman Di Indonesia Perspektif Arkeologi)*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Poellingomang. 1995. *Benturan Budaya di Bandar-Bandar Pesisir Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
- Puslit Arkenas. 1999. *Metode Penelitian Arkeologi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
- Sumantri, I. 2004. *Kepingan Mozaik Sejarah Budaya Sulawesi Selatan*. Makassar: Bagian Proyek Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Bekerja Sama dengan Penerbit Inninawa.
- Susanto, M. M. 2000. *Wawasan Naskah Lontara Untuk Kepentingan Arkeologi*. Makassar: Jurnal Walanae